

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Garum Pemerintah Kabupaten Blitar telah dapat menyelesaikan "RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN GARUM TAHUN 2025". Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Garum. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Garum maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Garum, 27 Agustus 2024

CAMAT GARUM



ARINAL HUDA, S.Pd., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700501 1993021 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2024 DAN EVALUASI RENJA TRIWULAN III TAHUN 2025	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Evaluasi Renja Triwulan III tahun 2025	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	32
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD ..	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	34
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

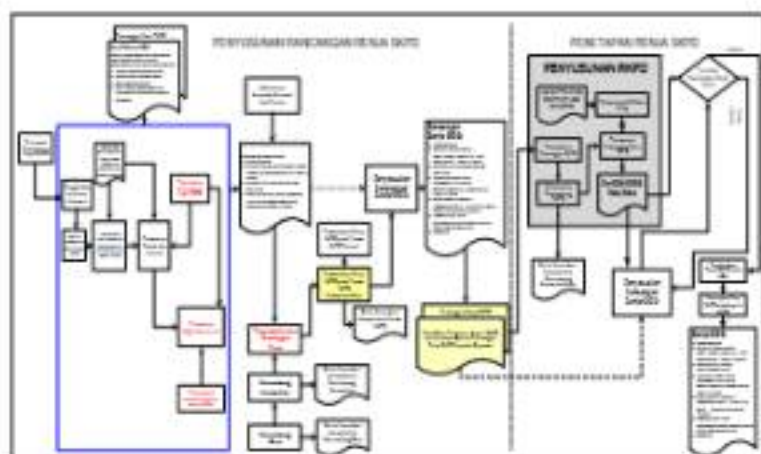
Kecamatan Garum menyusun Renja Kecamatan Garum Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Garum. Rancangan Awal Renja Kecamatan Garum Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Garum Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Elitar Tahun 2025. Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD Rancangan Akhir Renja 2025

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Garum perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja PD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja PD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja PD yang mampu mensinergikan antara program dan kegiatan maupun dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja-PD mengacu dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.



Alur Penyusunan Renja PD

Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bilar terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Kecamatan Garum dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adepun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
- t. Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 29/E);
- u. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
- v. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dirumuskan sesuai dengan tujuan Kecamatan Garum dan penyesuaian pada hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Sehingga tujuan yang ditekankan pada renja tahun 2025 sebagai berikut;

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Kesiapan secara sistemik dan prosedural bagi aparatur terkait penyusunan rencana kegiatan yang sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004.

2. Meningkatkan ruang aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan implementasi (pelaksanaannya) program Kecamatan ataupun Kelurahan/desa.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja PD) Kecamatan Garum sesuai dengan Permandagri No 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Urutan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Kecamatan Garum pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 (lima) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing - masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.186.302.030,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.006.563.534,- dengan persentase penyerapan sebesar 97,00%. Capaian Renstra Persentase Rata- rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dapat tercapai sebesar 97,00%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 8.880.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.395.000,- dengan persentase penyerapan 72,02%. Capaian Renstra Persentase Persentase Desa/Kelurahan dengan predikat IKM baik tercapai sebesar 72,02%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.612.030.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.341.091.540,-. Capaian Renstra Persentase Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan tercapai 92,00%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 13.847.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.720.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,86%. Indikator programnya adalah : Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dengan capaian sebesar 99 %.

Capaian Renstra Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun tercapai 99%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp 38.709.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 37.925.000,- atau sebesar 97,97%. Capaian Renstra Persentase Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan tercapai 97,97%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp 11.130.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.130.000,- dengan persentase penyerapan sebesar 100%. Capaian Renstra Persentase Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat dapat tercapai sebesar 93,41%.

Secara umum program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan kegiatan, tidak ada pelaksanaan program/ kegiatan yang melebihi target. Adanya rasionalisasi anggaran berkenaan dengan penanganan covid 19 di Kabupaten Blitar, akan tetapi kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing seksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

- Harus adanya internet yang cukup untuk pelayanan KTP, KK kepada masyarakat;
- Harus adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;

- Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan PD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus diikuti oleh Kecamatan Garum dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Umum Kelembagaan Rangka PD dan Rencanan Rencana PD s/d Tahun 2026
Kecamatan Serem Kabupaten Sitab

Kode	Unitas/Bidang Unitas Kecamatan Serem dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (kuantitatif/ Kualitas Kualitas)	Target Kinerja Kegiatan Program (Serem PD) Tahun 2020-2026	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kegiatan Kegiatan s/d dengan tahun tahun (s/d 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d)			Target program dan kegiatan s/d tahun s/d 2026	Realisasi Realisasi Capaian Target Rencana PD s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja PD tahun s/d 2021	Realisasi s/d Kinerja PD tahun s/d 2021	Tingkat s/ Kinerja s/d (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun s/ 2021	Tingkat Capaian Kinerja Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/9 40)	11=(10/9/40)
1	Unitas Kerja									
1	Bidang Urusan Desa/Desa Desa, Kecamatan Desa, dan Kecamatan Desa, Kecamatan Desa, Kecamatan									
1.01. 1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	99,9	75	75	99,99	100%	100%	100%

4.01 - 4.01.00.00 - 01.01	Penelitian dan Pengujian Administrasi Perkantoran	Penelitian dan pengujian administrasi perkantoran		0 juta Layanan	0 juta Layanan	0 juta Layanan	0 juta Layanan	0 juta Layanan	0 juta Layanan	100%
4.01 - 4.01.00.00 - 02	Program Pengujian Sistem dan Perangkat Aplikasi	Program Pengujian Sistem dan Perangkat Aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01 - 4.01.00.00 - 03.00	Penelitian dan Pengujian Sistem dan Perangkat Aplikasi	Penelitian dan Pengujian Sistem dan Perangkat Aplikasi		0,01	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	91,07
4.01 - 4.01.00.00 - 05	Program Pengujian Kapasitas Sumber Daya Aplikasi	Program Pengujian Kapasitas Sumber Daya Aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	00%	00%
4.01 - 4.01.00.00 - 00.01	Pengujian Regulasi dan Keaslian	Pengujian Regulasi dan Keaslian	00	0	07	07	100%	07	7	07,00
4.01 - 4.01.00.00 - 00	Program Penelitian, Pengembangan, Pengujian dan Pelaksanaan dan Pelaporan Sistem dan Perangkat	Program Penelitian, Pengembangan, Pengujian dan Pelaksanaan dan Pelaporan Sistem dan Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.01 - 4.01.02.02 - 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Binaja	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01 - 4.01.02.02 - 02.02	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Binaja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01 - 4.01.02.02 - 03.03	Facilitas Pengalihan Data Wilayah	Facilitas Pengalihan Data wilayah	2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	100%
4.01 - 4.01.02.02 - 12	Program Fasilitas Pemertanahan Desa dan Kelurahan	Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemertanahan, sertipikasi dan sertifikasi, pendaftaran tanah yang diutamakan dalam sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01 - 4.01.02.02 - 14.01	Facilitas dan Pemertanahan Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	100%

Berbagai Hal yang Perlu

4.01 - 4.01.05.00 - 10.00	Passive, Kesehatan dan Sistemisasi Perencanaan Pengembangan di Tingkat	Jumlah Kesehatan di sistemisasi Perencanaan Pengembangan	12 Juli	12 Juli	12 Juli	12 Juli	100%	12 Juli	12 Juli	100%
4.01 - 4.01.05.00 - 10.00	Passive, Perencanaan dan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Perencanaan Pengembangan	Jumlah Perencanaan yang dikembangkan	12 Juli	12 Juli	12 Juli	12 Juli	100%	12 Juli	12 Juli	100%
4.01 - 4.01.05.00 - 10.00	Passive, Perencanaan dan Sistem Kesehatan, Sosial, Budaya dan Ekonomi	Jumlah Perencanaan & sistem yang dikembangkan	12 Juli	12 Juli	12 Juli	12 Juli	100%	12 Juli	12 Juli	100%
4.01 - 4.01.05.00 - 10.00	Pengembangan Sistem dan Perencanaan Kesehatan (RHA Kesehatan)	Jumlah Sistem Kesehatan yang dikembangkan dan dikembangkan								
4.01 - 4.01.05.00 - 10.01	Pengembangan masyarakat Kesehatan (RHA Kesehatan)	Jumlah Kesehatan	2 Juli					2 Juli		
4.01 - 4.01.05.00 - 00	Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan yang dikembangkan	100%	100%		100%				
4.01 - 4.01.05.00 - 00.01	Passive dan Sistem Pelayanan Publik di Tingkat Kesehatan	Jumlah Sistem Kesehatan	2 Juli	2 Juli	2 Juli	2 Juli	100%	2 Juli	2 Juli	100%

0.01	0.01	00.00	00.00	Padaikan dan Penerimaan Layanan Perumahan	40000 (100%) steril	100%	70.00	100%	87.00	100%	90.00	90.00	100%
------	------	-------	-------	--	------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	------

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Garum adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Garum agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Garum melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disertai oleh Kecamatan Garum dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Garum tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Garum akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika kecamatan Garum membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa kecamatan Garum belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Kecamatan Garum

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	SKK	Target rencana SKPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n-1	Tahun n+1	
1	Indeks Kepuasan Aparatur			80%	85%	80%	87%	85%	90%	85%	90%	
2	Score SAKIP OPD			75%	80%	75%	78%	65%	73%	65%	90%	
3	IKM			75%	80%	75%	78%	65%	90,75 %	65%	90%	
4	Pemantauan peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertibatan, perselamatan, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Garum Kabupaten Elitar yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Garum, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Garum dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Garum sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain adalah belum terjalannya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi;
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
4. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
5. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode zwakelola).

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Garum dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Garum, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing PD tentang program dan kegiatan;

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat PD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk PD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Garum sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Elitar;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Garum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Garum, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Garum Kabupaten Elitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (komputer).

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Garum Kabupaten Elitar adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Kelurahan/ Desa belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Garum Kabupaten Elitar dalam kurun waktu 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin komplek dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Garum dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, PD dilindungi Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Saran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA , BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR. "** . Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;

2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas;
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Garum untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Garum mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- Memperpendek proses pelayanan
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Garum masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Garum dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA PD;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Garum, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;

Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Berang

Rencana strategis yang akan dilakukan Kecamatan Garum inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Garum berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Garum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di PD Kecamatan Garum Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 2.4.1, sebagai berikut :

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Sponsor	Project Status	Project Phase	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Risk	Project Complexity	Project Impact	Project Value	Project ROI	Project Score	Project Rating	Project Comments
1001	Project A	John Doe	Jane Smith	Completed	Phase 1	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Low	Medium	High	\$1,200,000	20%	95	5	Project A was completed successfully and on time.
1002	Project B	Jane Smith	John Doe	In Progress	Phase 2	\$2,000,000	2023-03-01	2024-06-30	15 Months	Medium	High	Medium	\$2,500,000	25%	85	4	Project B is currently in progress and on track.
1003	Project C	John Doe	Jane Smith	On Hold	Phase 3	\$3,000,000	2023-05-01	2024-12-31	20 Months	High	High	Low	\$3,500,000	15%	75	3	Project C is currently on hold due to budget constraints.
1004	Project D	Jane Smith	John Doe	Completed	Phase 4	\$4,000,000	2023-07-01	2024-03-31	10 Months	Low	Medium	High	\$4,500,000	12%	80	4	Project D was completed successfully and on time.
1005	Project E	John Doe	Jane Smith	In Progress	Phase 5	\$5,000,000	2023-09-01	2025-06-30	21 Months	Medium	High	Medium	\$6,000,000	20%	70	3	Project E is currently in progress and on track.
1006	Project F	Jane Smith	John Doe	On Hold	Phase 6	\$6,000,000	2023-11-01	2025-12-31	24 Months	High	High	Low	\$7,000,000	15%	60	2	Project F is currently on hold due to budget constraints.
1007	Project G	John Doe	Jane Smith	Completed	Phase 7	\$7,000,000	2024-01-01	2025-03-31	15 Months	Low	Medium	High	\$8,000,000	12%	85	4	Project G was completed successfully and on time.
1008	Project H	Jane Smith	John Doe	In Progress	Phase 8	\$8,000,000	2024-03-01	2026-06-30	27 Months	Medium	High	Medium	\$9,000,000	20%	70	3	Project H is currently in progress and on track.
1009	Project I	John Doe	Jane Smith	On Hold	Phase 9	\$9,000,000	2024-05-01	2026-12-31	30 Months	High	High	Low	\$10,000,000	15%	60	2	Project I is currently on hold due to budget constraints.
1010	Project J	Jane Smith	John Doe	Completed	Phase 10	\$10,000,000	2024-07-01	2027-03-31	33 Months	Low	Medium	High	\$11,000,000	12%	85	4	Project J was completed successfully and on time.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.61.7 1.6.5.5 1.61.5.5.1 6.2.0	Program Pengembangan Keterampilan Kejuruan Kejuruan Kejuruan					Jumlah Karyawan di Program Kejuruan Kejuruan	4 24 1			25.750.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.61.7 1.6.5.5 1.61.5.5.1 7.2.0	Program Pengembangan Keterampilan Kejuruan Kejuruan Kejuruan					Jumlah Karyawan di Program Kejuruan Kejuruan	11 42 1			25.750.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.61.5.5.1 7.2.0
1.61.7 1.6.5.5 1.61.5.5.1 8	Program Pengembangan Keterampilan Kejuruan Kejuruan					Jumlah Karyawan di Program Kejuruan Kejuruan	4 24 1			25.750.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.61.7 1.6.5.5 1.61.5.5.1 8.2.0	Program Pengembangan Keterampilan Kejuruan Kejuruan					Jumlah Karyawan di Program Kejuruan Kejuruan	4 24 1			25.750.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitik beratkan pada sinkronisasi rencana kerja antar PD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalan usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan Januari);

2. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (minggu IV bulan Januari s/d minggu I bulan Februari);
3. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum PD. Pada tahap ini peranan PD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka (minggu II bulan Februari);
4. Forum PD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan PD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
5. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing PD terkait. (minggu II bulan Maret).

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung Kecamatan Garum pada tahun 2025 di bagi beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
2. Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
3. Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
4. Peningkatan Infrastruktur ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi PD

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatakelraha
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang “*menyentuh hati*” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “*dilayani*” menjadi “*melayani*”.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka Kecamatan Garum harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Tawqibatun, Warobbun Ghafur)".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan itu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- MISI 1 "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
- MISI 2 "Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
- MISI 3 "Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
- MISI 4 "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan."

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Garum sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian Misi Ke-1 "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya" dan Misi ke-3 "Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Garum pada tahun 2025 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
2. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Elitar pada tahun 2025, ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Persentase gangguan transtibum di wilayah kecamatan yang dapat diselesaikan;
3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes;
4. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- b. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang - undangan yang ada ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- f. Meningkatkan system pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Tupuk dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Garum
Kabupaten Bitar

No	Tupuk/Sasaran	Indikator Tupuk dan Sasaran	Indikator KUALITAS		TUPUK					Indikator K / Sasaran No. No
			2008 (awal)	2009 (akhir)	2008	2009	2010	2011	2012	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Kepada Desa	Nilai Pelayanan Publik	72%	72%	72%	80%	82%	82%	82%	82%
	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas pelayanan publik kepada desa	Peningkatan Kualitas Efektivitas pelayanan publik kepada desa yang diarahkan ke desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas serta Efisiensi Kinerja Pelayanan Dasar di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks	88	88	78	78	78	78	78	78
	Meningkatnya Efektivitas	Presensi DAKP	88	88	88	88	88	88	88	88

NO	TUMBUH/BAHAKAN	INDIKATOR TUNJUK DAN SARAFAN	KONDISI AWAL KEHUTUKA PD		TARGET					KONDISI 1 / KONDISI DA PD
			2009 (awal mul)	2011 (akhir mul)	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek Peningkatan Kualitas									
	Kelembagaan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas serta Pembinaan Kelembagaan Kelembagaan	Peningkatan Kualitas yang memiliki administrasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas, Kelembagaan, Kelembagaan, dan Kelembagaan dalam Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan	Peningkatan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gerum Nabugaten Matar
Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
			Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP	Nilai	72
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Profilak SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase desa yang memiliki administrasi baik	%	100
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa mandiri di kecamatan	%	90
			Indeks Kesehatan Sosial	Nilai	80

4	Memperkuat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai religius, kecerdasan, solidaritas sosial, dan gelung riway dalam kehidupan masyarakat.	Memperkuatnya koordinasi, konsentrasi dan kontribusi umum	Penerapan program transbum di wilayah yang dapat dilaksanakan	4	55
---	--	---	---	---	----

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Garum maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Garum adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama.

Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Garum melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik sehubungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan PD Kecamatan Garum pada tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur"**. Di Tahun 2025 pada Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program, 15 (Empat belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan Subkegiatan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan PD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Garum Tahun 2025 adalah 6 (enam) Program dengan 13 Kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu kecamatan Garum.

Program dan indikator program yang ditetapkan oleh Kecamatan Garum Kabupaten Blitar adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota indikatornya adalah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan target capaian 100%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik dengan target capaian 100%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target capaian 5 kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target capaian 5 kegiatan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya adalah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target capaian 10 kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat dengan target capaian 20 dokumen;

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target capaian 12 laporan;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan target capaian 16 laporan;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan target 12 bulan.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian 12 orang;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah jumlah jenis pengadaan BMD dengan target capaian 7 jenis;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 12 bulan;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator jumlah waktu penyediaan pemeliharaan BMD targetnya 12 bulan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan targetnya 12 kali;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat indikatornya adalah jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan target 1 kegiatan.
 - c. Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan indikator jumlah layanan yang dilaksanakan mempunyai target 3 layanan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa indikatornya adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 10 kali.
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator jumlah kegiatan yang dilaksanakan targetnya 4 kali;
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kegiatan jumlah koordinasi yang dilaksanakan mempunyai target 10 kali.
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan targetnya 5 kegiatan.
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 10 kali.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
 Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Garum sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Garum dan melingkupi semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif adalah sebesar :

Rp 8.840.898.830.00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Elitar dan Dana Kelurahan.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

**REKAMEN KIRI ALIR KURSUS PEMASANGAN TUBERAKSI BIRUKA (PDI)
SEKOLAH TUNBUK KAD. AL-FUD
TUNBUK KAD**

No	RUM	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN						JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN		JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN
							JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN	JUDUL KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN KIRAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		REKAMEN KIRAN														
2		REKAMEN KIRAN														
3		REKAMEN KIRAN														
4		REKAMEN KIRAN														
5		REKAMEN KIRAN														
6		REKAMEN KIRAN														
7		REKAMEN KIRAN														
8		REKAMEN KIRAN														
9		REKAMEN KIRAN														
10		REKAMEN KIRAN														
11		REKAMEN KIRAN														
12		REKAMEN KIRAN														
13		REKAMEN KIRAN														
14		REKAMEN KIRAN														
15		REKAMEN KIRAN														
16		REKAMEN KIRAN														
17		REKAMEN KIRAN														
18		REKAMEN KIRAN														
19		REKAMEN KIRAN														
20		REKAMEN KIRAN														
21		REKAMEN KIRAN														
22		REKAMEN KIRAN														
23		REKAMEN KIRAN														
24		REKAMEN KIRAN														
25		REKAMEN KIRAN														
26		REKAMEN KIRAN														
27		REKAMEN KIRAN														
28		REKAMEN KIRAN														
29		REKAMEN KIRAN														
30		REKAMEN KIRAN														
31		REKAMEN KIRAN														
32		REKAMEN KIRAN														
33		REKAMEN KIRAN														
34		REKAMEN KIRAN														
35		REKAMEN KIRAN														
36		REKAMEN KIRAN														
37		REKAMEN KIRAN														
38		REKAMEN KIRAN														
39		REKAMEN KIRAN														
40		REKAMEN KIRAN														
41		REKAMEN KIRAN														
42		REKAMEN KIRAN														
43		REKAMEN KIRAN														
44		REKAMEN KIRAN														
45		REKAMEN KIRAN														
46		REKAMEN KIRAN														
47		REKAMEN KIRAN														
48		REKAMEN KIRAN														
49		REKAMEN KIRAN														
50		REKAMEN KIRAN														
51		REKAMEN KIRAN														
52		REKAMEN KIRAN														
53		REKAMEN KIRAN														
54		REKAMEN KIRAN														
55		REKAMEN KIRAN														
56		REKAMEN KIRAN														
57		REKAMEN KIRAN														
58		REKAMEN KIRAN														
59		REKAMEN KIRAN														
60		REKAMEN KIRAN														
61		REKAMEN KIRAN														
62		REKAMEN KIRAN														
63		REKAMEN KIRAN														
64		REKAMEN KIRAN														
65		REKAMEN KIRAN														
66		REKAMEN KIRAN														
67		REKAMEN KIRAN														
68		REKAMEN KIRAN														
69		REKAMEN KIRAN														
70		REKAMEN KIRAN														
71		REKAMEN KIRAN														
72		REKAMEN KIRAN														
73		REKAMEN KIRAN														
74		REKAMEN KIRAN														
75		REKAMEN KIRAN														
76		REKAMEN KIRAN														
77		REKAMEN KIRAN														
78		REKAMEN KIRAN														
79		REKAMEN KIRAN														
80		REKAMEN KIRAN														
81		REKAMEN KIRAN														
82		REKAMEN KIRAN														
83		REKAMEN KIRAN														
84		REKAMEN KIRAN														
85		REKAMEN KIRAN														
86		REKAMEN KIRAN														
87		REKAMEN KIRAN														
88		REKAMEN KIRAN														
89		REKAMEN KIRAN														
90		REKAMEN KIRAN														
91		REKAMEN KIRAN														
92		REKAMEN KIRAN														
93		REKAMEN KIRAN														
94		REKAMEN KIRAN														
95		REKAMEN KIRAN														
96		REKAMEN KIRAN														
97		REKAMEN KIRAN														
98		REKAMEN KIRAN														
99		REKAMEN KIRAN														
100		REKAMEN KIRAN														

[illegible]

No.	Code	Name of the Project / Activity	Description of the Project / Activity	Status	Start Date	End Date	Duration	Financial Information				Total Cost	Funding Source	Remarks
								Budget	Actual Cost	Variance	Percentage			
1	001	Construction of a new building	Construction of a new building with 10 floors, including interior and exterior works.	Completed	2018-01-01	2018-12-31	12 months	10000000	9800000	200000	2%	10000000	Government	Completed on time and within budget.
2	002	Renovation of an old building	Renovation of an old building with 5 floors, including interior and exterior works.	In Progress	2019-01-01	2019-12-31	12 months	5000000	4500000	500000	10%	5000000	Private	Progressing well, slightly under budget.
3	003	Construction of a new bridge	Construction of a new bridge with 200m length, including foundation and superstructure.	Completed	2017-01-01	2017-12-31	12 months	8000000	8200000	-200000	-2%	8000000	Government	Completed on time and within budget.
4	004	Renovation of an old bridge	Renovation of an old bridge with 100m length, including foundation and superstructure.	In Progress	2019-01-01	2019-12-31	12 months	3000000	2800000	200000	7%	3000000	Private	Progressing well, slightly under budget.
5	005	Construction of a new road	Construction of a new road with 5km length, including foundation and superstructure.	Completed	2018-01-01	2018-12-31	12 months	6000000	6100000	-100000	-1%	6000000	Government	Completed on time and within budget.
6	006	Renovation of an old road	Renovation of an old road with 2km length, including foundation and superstructure.	In Progress	2019-01-01	2019-12-31	12 months	2000000	1800000	200000	10%	2000000	Private	Progressing well, slightly under budget.
7	007	Construction of a new airport	Construction of a new airport with 1000m length, including foundation and superstructure.	Completed	2017-01-01	2017-12-31	12 months	15000000	15200000	-200000	-1%	15000000	Government	Completed on time and within budget.
8	008	Renovation of an old airport	Renovation of an old airport with 500m length, including foundation and superstructure.	In Progress	2019-01-01	2019-12-31	12 months	7000000	6500000	500000	7%	7000000	Private	Progressing well, slightly under budget.
9	009	Construction of a new railway	Construction of a new railway with 100km length, including foundation and superstructure.	Completed	2018-01-01	2018-12-31	12 months	12000000	12100000	-100000	-1%	12000000	Government	Completed on time and within budget.
10	010	Renovation of an old railway	Renovation of an old railway with 50km length, including foundation and superstructure.	In Progress	2019-01-01	2019-12-31	12 months	6000000	5500000	500000	8%	6000000	Private	Progressing well, slightly under budget.

No	Jenis	Kategori, Subkategori, dan Kode Barang	Keterangan	Satuan	Jumlah	Nilai	Keterangan	Kategori, Subkategori, dan Kode Barang						Keterangan	Kategori, Subkategori, dan Kode Barang		Keterangan
								1	2	3	4	5	6		7	8	
1	Barang	Barang															
2	Barang	Barang															
3	Barang	Barang															
4	Barang	Barang															
5	Barang	Barang															
6	Barang	Barang															
7	Barang	Barang															
8	Barang	Barang															
9	Barang	Barang															
10	Barang	Barang															
11	Barang	Barang															
12	Barang	Barang															
13	Barang	Barang															
14	Barang	Barang															
15	Barang	Barang															
16	Barang	Barang															
17	Barang	Barang															
18	Barang	Barang															
19	Barang	Barang															
20	Barang	Barang															
21	Barang	Barang															
22	Barang	Barang															
23	Barang	Barang															
24	Barang	Barang															
25	Barang	Barang															
26	Barang	Barang															
27	Barang	Barang															
28	Barang	Barang															
29	Barang	Barang															
30	Barang	Barang															
31	Barang	Barang															
32	Barang	Barang															
33	Barang	Barang															
34	Barang	Barang															
35	Barang	Barang															
36	Barang	Barang															
37	Barang	Barang															
38	Barang	Barang															
39	Barang	Barang															
40	Barang	Barang															
41	Barang	Barang															
42	Barang	Barang															
43	Barang	Barang															
44	Barang	Barang															
45	Barang	Barang															
46	Barang	Barang															
47	Barang	Barang															
48	Barang	Barang															
49	Barang	Barang															
50	Barang	Barang															
51	Barang	Barang															
52	Barang	Barang															
53	Barang	Barang															
54	Barang	Barang															
55	Barang	Barang															
56	Barang	Barang															
57	Barang	Barang															
58	Barang	Barang															
59	Barang	Barang															
60	Barang	Barang															
61	Barang	Barang															
62	Barang	Barang															
63	Barang	Barang															
64	Barang	Barang															
65	Barang	Barang															
66	Barang	Barang															
67	Barang	Barang															
68	Barang	Barang															
69	Barang	Barang															
70	Barang	Barang															
71	Barang	Barang															
72	Barang	Barang															
73	Barang	Barang															
74	Barang	Barang															
75	Barang	Barang															
76	Barang	Barang															
77	Barang	Barang															
78	Barang	Barang															
79	Barang	Barang															
80	Barang	Barang															
81	Barang	Barang															
82	Barang	Barang															
83	Barang	Barang															
84	Barang	Barang															
85	Barang	Barang															
86	Barang	Barang															
87	Barang	Barang															
88	Barang	Barang															
89	Barang	Barang															
90	Barang	Barang															
91	Barang	Barang															
92	Barang	Barang															
93	Barang	Barang															
94	Barang	Barang															
95	Barang	Barang															
96	Barang	Barang															
97	Barang	Barang															
98	Barang	Barang															
99	Barang	Barang															
100	Barang	Barang															

[illegible]

Received: 2018-05-01; accepted: 2018-05-01; published: 2018-05-01
doi:10.1002/eqe.2500

[illegible]

**REKAPITULASI HASIL PENGALAMAN PELATIHAN
KELOMPOK KEMAHIRUAN KIRIL, 2019
Tahun 2019**

No	Nama	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan				Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan		Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan
							Anggota KIRIL	Anggota KIRIL	Anggota KIRIL	Anggota KIRIL		Anggota KIRIL	Anggota KIRIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Anggota KIRIL						Anggota KIRIL						100
1	Anggota KIRIL													100
2	Anggota KIRIL													100
3	Anggota KIRIL													100
4	Anggota KIRIL													100
5	Anggota KIRIL													100
6	Anggota KIRIL													100
7	Anggota KIRIL													100
8	Anggota KIRIL													100
9	Anggota KIRIL													100
10	Anggota KIRIL													100
11	Anggota KIRIL													100
12	Anggota KIRIL													100
13	Anggota KIRIL													100
14	Anggota KIRIL													100
15	Anggota KIRIL													100
16	Anggota KIRIL													100
17	Anggota KIRIL													100
18	Anggota KIRIL													100
19	Anggota KIRIL													100
20	Anggota KIRIL													100
21	Anggota KIRIL													100
22	Anggota KIRIL													100
23	Anggota KIRIL													100
24	Anggota KIRIL													100
25	Anggota KIRIL													100
26	Anggota KIRIL													100
27	Anggota KIRIL													100
28	Anggota KIRIL													100
29	Anggota KIRIL													100
30	Anggota KIRIL													100
31	Anggota KIRIL													100
32	Anggota KIRIL													100
33	Anggota KIRIL													100
34	Anggota KIRIL													100
35	Anggota KIRIL													100
36	Anggota KIRIL													100
37	Anggota KIRIL													100
38	Anggota KIRIL													100
39	Anggota KIRIL													100
40	Anggota KIRIL													100
41	Anggota KIRIL													100
42	Anggota KIRIL													100
43	Anggota KIRIL													100
44	Anggota KIRIL													100
45	Anggota KIRIL													100
46	Anggota KIRIL													100
47	Anggota KIRIL													100
48	Anggota KIRIL													100
49	Anggota KIRIL													100
50	Anggota KIRIL													100
51	Anggota KIRIL													100
52	Anggota KIRIL													100
53	Anggota KIRIL													100
54	Anggota KIRIL													100
55	Anggota KIRIL													100
56	Anggota KIRIL													100
57	Anggota KIRIL													100
58	Anggota KIRIL													100
59	Anggota KIRIL													100
60	Anggota KIRIL													100
61	Anggota KIRIL													100
62	Anggota KIRIL													100
63	Anggota KIRIL													100
64	Anggota KIRIL													100
65	Anggota KIRIL													100
66	Anggota KIRIL													100
67	Anggota KIRIL													100
68	Anggota KIRIL													100
69	Anggota KIRIL													100
70	Anggota KIRIL													100
71	Anggota KIRIL													100
72	Anggota KIRIL													100
73	Anggota KIRIL													100
74	Anggota KIRIL													100
75	Anggota KIRIL													100
76	Anggota KIRIL													100
77	Anggota KIRIL													100
78	Anggota KIRIL													100
79	Anggota KIRIL													100
80	Anggota KIRIL													100
81	Anggota KIRIL													100
82	Anggota KIRIL													100
83	Anggota KIRIL													100
84	Anggota KIRIL													100
85	Anggota KIRIL													100
86	Anggota KIRIL													100
87	Anggota KIRIL													100
88	Anggota KIRIL													100
89	Anggota KIRIL													100
90	Anggota KIRIL													100
91	Anggota KIRIL													100
92	Anggota KIRIL													100
93	Anggota KIRIL													100
94	Anggota KIRIL													100
95	Anggota KIRIL													100
96	Anggota KIRIL													100
97	Anggota KIRIL													100
98	Anggota KIRIL													100
99	Anggota KIRIL													100
100	Anggota KIRIL													100

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Garum Kabupaten Elitar pada tahun 2025 merencanakan 6 program dan 13 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 9.135.492.485,00. Secara keseluruhan ada 6 program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Garum Kabupaten Elitar pada tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 5.709.767.059,- dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 4.105.560,00
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 3.633.812.507,00
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 130.000.000,00
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 438.634.305,00
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 316.484.535,00
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 792.897.716,00

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 260.843.124,00
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 29.916.400,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan dengan pagu anggaran Rp 29.916.400,00
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Pagu Rp. 29.610.768.000 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp. 29.610.768.000,00
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 30.582.394,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 30.582.394,00
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 32.739.750,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp 32.739.750,00
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 10.140.000,00 ;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 10.140.000,00

BAB V

PENUTUP

Secara dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Garum maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Garum adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Garum agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada itu-itu strategis yang berkembang di Kecamatan Garum antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah (pelayanan publik)
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Penataan organisasi dan manajemen publik
4. Pengelolaan keuangan dan barang

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Garum masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya Kecamatan Garum dalam memahami Program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA PD;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Masih kurangnya ruang arsip, sehingga belum Penataan administrasi, khususnya arsip dokumen yang sangat vital belum optimal. Berdasarkan itu-itu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Garum, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Garum untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengurulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Elitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Mengoptimalkan pemahaman penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengurulkan kepada PD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengurulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengurulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

Garum, Agustus 2024

CAMAT GARUM



ARINAL HUDA, S.Pd., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700501 1993021 004

